

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024		

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.070.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi "Operasi kapal perikanan tangkap/speedboat pengawas" Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional "POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan" Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi Operasi kapal perikanan tangkap/speedboat pengawas Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1.00 dokumen 2.00 operasi kapal 92 persen 92.00 Persen 70.00 Persen 15.00 kelompok 70 persen 85.00 Persen 15 Kelompok 1 Dokumen 2 Operasi Kapal 75 % 80 % 90 % 95 %	Capaian Program	1.00 dokumen 2.00 operasi kapal 92 persen 92.00 Persen 70.00 Persen 15.00 kelompok 70 persen 85.00 Persen 15 Kelompok 1 Dokumen 2 Operasi Kapal 75 % 80 % 90 % 95 %	1.00 dokumen 2.00 operasi kapal 92 persen 92.00 Persen 70.00 Persen 15.00 kelompok 70 persen 85.00 Persen 15 Kelompok 1 Dokumen 2 Operasi Kapal 75 % 80 % 90 % 95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.070.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.070.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	Keluaran	: Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember

